

RADIKALISASI PETANI MUSLIM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

M. Mawardi J

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung
mawardi221266@gmail.com

Abstrak

Radikalisme petani kemunculannya bukan disebabkan oleh adanya gangguan dalam struktur sosial, melainkan karena terjadinya proses eksploitasi dan dominasi satu kelas terhadap kelas lainnya. Radikalisme petani dipahami sebagai reaksi kaum proletar terhadap kaum borjuis, merupakan ekspresi dari struktur kelas yang kontradiktif. Deprivasi sosial-ekonomi dan represi politik dari negara dan kekuatan ekonomi pasar/kapitalisme merupakan faktor yang menumbuh-kembangkan eksklusifisme perlawanan. Lebih lagi ketika ada kebijakan agraria yang merugikan kepentingan petani, baik dalam mengakses maupun dalam penguasaan terhadap sumber daya agraria (tanah), akan melahirkan perlawanan petani yang semakin keras, militan, emosional dan destruktif. Radikalisme yang dilakukan oleh komunitas petani muslim, menjadikan fanatisme agama sebagai ideologi gerakan dan sumber inspirasi serta nilai yang digunakan dalam membangun komunalisme, bahkan mereka mampu mengkonstruksi radikalisme dengan menggunakan simbol-simbol agama sebagai pembingkai tindakan yang dilakukan sehingga semakin memotivasi dan memobilisasi perlawanan. Meskipun demikian perlawanan petani yang dipimpin oleh Warsidi mengalami kegagalan, bahkan muncul stigma baru sebagai gerakan pengacau keamanan yang ingin mendirikan negara Islam.

Kata Kunci : *Petani, Perlawanan, Simbol agama, Agraria.*

Abstract

The emergence of the Peasant radicalism is not caused by any defect in the social structure, but because the process of exploitation and

domination of one class against another. The Peasant radicalism is understood as a reaction of the proletariat against the bourgeoisie, is an expression of a contradictory class structure. The Socio-economic deprivation and the political repression of the state and economic power market / capitalism is a factor that grows and develops exclusivism resistance. Moreover when there are agrarian policies that harm the interests of the farmers, both in accessing and in the mastery of agrarian resources (land), will give birth to an increasingly harsh peasant resistance, militant, emotional and destructive. The radicalism done by farmers Muslim community, makes the religion fanaticism as a movement ideology and an inspiration source as well as the value used in constructing communalism, even they are able to construct radicalism using religious symbols as edging actions taken thus further motivate and mobilize the resistance. Nevertheless resistance farmers led by warsidi failures, even appearing new stigma as the movement of security meddler who want to establish an Islamic state.

Keywords: *Peasant, resistance, religious symbols, agrarian.*

A. Pendahuluan

Tulisan tentang radikalisasi petani muslim dalam perspektif sosiologis merupakan bagian dari isi disertasi tentang “Perlawanan Petani terhadap Ketidakadilan Kebijakan Agraria dalam stigma jihad (Studi pada masyarakat Talangsari Lampung Timur). Buah dari radikalisasi adalah perlawanan. Ada banyak kasus yang menunjukkan perlawanan petani yang dipimpin oleh para bangsawan dan lebih banyak lagi kasus perlawanan yang dipimpin oleh ulama pedesaan atau guru. Mobilisasi petani pada masa lalu kebanyakan memakai ideologi ratu adil atau jihad fi-sabilillah sebagaimana nampak pada gerakan missianisme dan millenarianisme pada abad ke-19. Bahkan gerakan-gerakan modern seperti Sarekat Islam tidak jarang memakai ideologi Ratu Adil di tingkat pengikut bawahan

Radikalisasi merupakan bentuk dari resistensi petani terhadap kebijakan negara yang seringkali menjadikan tanah sebagai bagian dari perpolitikan dan alat kepentingan penguasa, oleh sebab itu untuk menjelaskan fenomena tersebut penulis

menggunakan dua tesis utama¹. *Pertama*, tesis yang menekankan adanya polarisasi masyarakat pedesaan yang susunan kelasnya terdiri dari atas tuan tanah dan petani penggarap, yang keduanya berada dalam kedudukan yang berkesenjangan. *Kedua*, tesis yang menekankan adanya ketegangan kultural, yaitu antara mereka yang kuat agama (santri) dan yang tidak taat agama (abangan). Di sini dasar dari konflik dan kooperasi ialah aliran, sehingga politik aliran terdiri dari sebuah partai politik yang dikelilingi sejumlah organisasi sukalera yang secara formal maupun informal terkait dengannya, politik aliran merupakan bentuk koalisi vertikal tanpa membedakan kelas sosial dan stratifikasi.

Tesis ketiga yang berusaha menggabungkan kedua tesis yang menganggap masyarakat pedesaan Indonesia menderita dua macam konflik, sosial-ekonomi dan kultural. Kelompok ini menganggap bahwa tahun 1965, yaitu saat penumpasan G-30-S-PKI sebagai massacre karena memuncaknya kedua macam konflik yang tidak terhindarkan, ekonomi dan agama, atau tanah dan keyakinan agama. Secara lebih jelas ini pendapat ini menyatakan adanya konflik kepentingan antara tuan tanah yang direpresentasikan pada fanatisme agama melawan kepentingan petani yang direpresentasikan oleh komunisme.

Pada masa Orde Baru, mayoritas radikalisasi petani dengan taktik aksi sepihak yang tidak terafiliasi pada suatu organisasi ideologis dengan sasaran justeru pemerintah daerah dan pusat. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam paket kebijakan yang tidak memihak dan mengakomodir kepentingan petani. Sawah, ladang dan kebun, bahkan rumah tempat tinggal yang secara turun temurun dikelola dan menjadi tumpuan hidup secara tiba-tiba dan dengan mudahnya diambil alih oleh negara. Ribuan bahkan jutaan rakyat pun secara mendadak kehilangan tanah yang menjadi andalan hidupnya. Nasib rakyat di pedesaan, semakin terpuruk ketika pemerintahan rezim Orde Baru mengadopsi ideologi *developmentalism* yang memandang tanah sebagai komoditas, sehingga radikalisasi petani pada masa Orde Baru

¹ Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani (Yogyakarta, Benteng Intervisi Utama, 1994), h.1.

lebih bersifat vertikal antara pemegang hak tanah dengan petani yang memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupannya.²

Meskipun secara normatif pembangunan pertanian menjadi tulang punggung perekonomian, nyatanya ketidakpuasan menyangkut persoalan agraria tetap saja tidak terhindarkan. Menurut catatan, semenjak tahun 1968 hingga berakhirnya kekuasaan Orde Baru, data yang terekam dan terpublikasikan menunjukkan setidaknya terdapat enam puluh kasus perlawanan sengketa tanah berskala besar. Situasi di lapangan sudah tentu lebih banyak, apalagi jumlah tersebut tidak termasuk upaya penyerobotan lahan yang diperkirakan ribuan jumlahnya. Serangkaian konflik agrarian tersebut berlangsung antara rakyat dan perkebunan, para pemegang konsesi hutan, kehutanan, maupun pemerintah sendiri.

Tulisan singkat berikut adalah ringkasan untuk suatu refleksi dari ketidakkonsistenan kebijakan agraria dikawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak Lampung Timur yang melahirkan perlawanan petani, dengan melihat ketegangan-ketegangan agraria dan radikalisasi yang dilakukan oleh kekuatan supra lokal untuk menjelaskan keterlibatan petani.

B. Pembahasan

1. Ketidakkonsistenan Kebijakan agraria sebagai pemicu Perlawanan Petani

Radikalisasi petani dalam bentuk perlawanan terhadap pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas di kawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak Lampung Timur. Konflik antara keduanya tidak terlepas dari sejarah masuknya penduduk di kawasan hutan akibat ketidakkonsistenan kebijakan agraria di wilayah tersebut. Serangkaian aktifitas masyarakat, sejak masa orde lama hingga adanya proses penataan ulang penggunaan lahan pada tahun 1980 telah menjadi sumber konflik utama³. Sejarah menunjukkan hubungan penuh

² Endang Suhendar dan Yahana Budi Winarni, *Petani dan Konflik Agraria*, (Bandung, Yayasan AKATIGA, 1997), h.2-3.

³ Ahmad Kusworo, *Perambah Hutan atau Kambing Hitam ? Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung*, (Bogor, Pustaka Latin, 2000), h.47-48.

ketegangan dan konfliktual memang selalu mewarnai hubungan antara petani dan penguasa di Indonesia, khusus berkaitan dengan masalah agraria. Hanya karena kuatnya kontrol negara yang menyebabkan rakyat tidak bisa melakukan perlawanan secara terbuka. Kalau kemudian, terjadi aksi perlawanan terbuka, massal dan ekspresif melalui aksi radikal oleh petani di Talangsari, selain karena faktor krisis subsistensi dan politik, juga karena akumulasi kejengkelan dan kemarahan yang bernuansa *deprivasi relatif*. Teori deprivasi relatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana kondisi petani (jamaah Warsidi) yang tertinggal secara ekonomi. Menurut Ted Robert Gurr⁴; semakin besar intensitas ketidakpuasan dalam masyarakat, maka semakin besar dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan. Pengabsahan kekerasan itu dimotivasi oleh kerangka normatif dan utilitarianis yang dimiliki masyarakat. Tidak fleksibelnya penerapan nilai dan terdegradasinya kondisi kehidupan masyarakat serta pembatasan kesempatan secara struktural akan memiliki efek pendorong terjadinya kekerasan. Ketidakkonsistenan kebijakan terhadap hak akses dan penguasaan lahan menjadi sumber utama terjadinya ketegangan antara petani yang selama ini telah mengusahakan lahannya untuk kehidupannya dengan pemegang otoritas kawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak Lampung Timur.

Semula hutan lindung register 38 Gunung Balak yang luasnya mencapai 19.680 hektar ditetapkan sebagai area tangkapan air (*water catchment area*) untuk menjaga kestabilan debit air danau Way Jepara oleh pemerintahan Kolonial Belanda melalui Besluit Residen No.664 tahun 1935. Pada tahun 1963 beberapa orang tokoh organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang menjadi underbouw Partai Komunis Indonesia (PKI) datang dan mulai membuka bagian timur kawasan hutan dan membuat perkampungan.

Areal yang dibuka berada di bagian dalam hutan sedangkan bagian luarnya dibiarkan tetap berhutan sebagai tabir, sehingga tidak terlihat dari arah luar, selanjutnya puluhan penduduk di sekitar wilayah tersebut diajak oleh para tokoh BTI untuk

⁴ Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, (New Jersey, Princeton University Press, 1970), h. 13.

menggarap dan menempati lahan yang luasnya mencapai 1.200 hektar.

Penduduk yang menempati lahan tersebut pada pertengahan tahun 1965 mencapai 2.560 jiwa⁵ yang terbagi kedalam empat wilayah yaitu Berdikari Blok I, II, III, dan IV. Pada masa terjadi peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965, delapan tokoh BTI setempat ditangkap oleh aparat militer, dua diantaranya yaitu Midjo dan Murdjito meninggal dalam perjalanan, sementara yang lain ditahan. Dalam perkembangannya keempat wilayah yang terdiri dari empat blok dirubah namanya; blok I menjadi dukuh Srikaton, blok II menjadi dukuh Srimulyo, blok III menjadi dukuh Srikaloka, dan blok IV menjadi dukuh Sriwidodo. Pedukuhan-pedukuhan ini kemudian dikenal dengan sebutan 4-Sri.

Pada tahun 1971 sebagai realisasi dari Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA. I), muncul rencana pembangunan proyek waduk Danau Way Jepara berikut saluran irigasi yang diestimasi dapat mengairi 7.000 hektar lahan pertanian (persawahan), oleh sebab itu dilakukan survei kelayakan oleh Direktorat Jendral Agraria Bersama SAE (Survey Agro Ekonomi), berdasarkan peta penggunaan tanah *Inspeksi Land Use* (ILU) diketahui bahwa penggunaan lahan di bagian hulu danau Way Jepara membahayakan ketersediaan sumber air danau yang berasal dari sekitar "Rawa Way Abar". Hal ini kemudian memunculkan gagasan (kebijakan) untuk melakukan tindakan relokasi dalam upaya melestaikan daerah tangkapan air (*water catchment area*) untuk melindungi sumber-sumber air Danau Way Jepara.

Oleh sebab itu pada tahun 1971 terbit surat Gubernur Lampung No. G/167/1971 tanggal 21 Oktober 1971, isi surat adalah perintah untuk segera mengosongkan kawasan hutan register 38 Gunung Balak dengan tujuan untuk menjaga debit air Danau Way Jepara. Sebagai tindak lanjut pada bulan April 1972 melalui team pengosongan yang terdiri dari aparatus Kecamatan, Koramil, Polsek Kecamatan Gunung Balak memerintahkan penduduk untuk meninggalkan Gunung Balak, sebagian warga mengungsi akan tetapi ada juga yang bertahan. Terjadi

⁵ Data Dinas Kehutanan Propinsi Lampung 1995

ketegangan dan bentrokan fisik antara team pengosongan dengan warga setempat yang bertahan. Sebagian warga mengadukan permasalahan ini ke berbagai lembaga di Jakarta, diantaranya ke Resimen Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD), Kopkamtib, Menhankam, dan DPR RI.

Proses pengosongan wilayah di kawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak mengalami kegagalan dan sempat terjadi pertumpahan darah. Seorang petugas mantri Pamong Praja “Muchtar” tewas dikeroyok oleh penduduk ketika mencoba mengusir penduduk. Akhirnya pada tanggal 20 April 1974 terbit Surat Bupati Lampung Tengah No. 8/I.K/P/Pem/1974 tanggal 20 April 1974, tentang Pengesahan pedukuhan di kawasan Gunung Balak menjadi Desa persiapan yang berjumlah 12 desa : Srikaton, Sriloka, Sriwidodo, Bandung Jaya, Ogan Jaya, Sidodadi, Sidorejo, Brawijaya, Mojopahit, Way Abar, Yabakti. Bahkan terbit pula Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/85/D.I/HK/1974 tanggal 13 Juni 1974 tentang Pembentukan Kecamatan Perwakilan Gunung Balak.

Menindaklanjuti keputusan pembentukan kecamatan, maka pada tanggal 24 Juni 1974 Gubernur Sutiyoso mengeluarkan SK. No.G/88/D.I/HK/1974 yang isinya menetapkan lebih kurang areal seluas 11.500 hektar di bagian hulu Danau Way Jepara sebagai daerah tangkapan air (*water catchment area*). Dari luas tersebut, 4.500 hektar berada di luar batas register 38, dan selebihnya merupakan bagian dari 19.860 ha register 38. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 1974 Bandar Agung dijadikan sebagai Ibukota Kecamatan Gunung Balak dengan Lukman Hakim sebagai camat. Penduduk kecamatan Gunung Balak ini memanfaatkan lahannya dengan menanam tanaman keras seperti cengkeh, kopi, kelapa, damar dan mahoni sesuai dengan arahan pemerintah setempat (pemerintah tingkat II). Pada saat itu penduduk Kecamatan Gunung Balak⁶ mencapai 11.993 KK atau 56.356 jiwa yang tersebar di 13 Desa terdiri dari berbagai etnik diantaranya : Sunda, Jawa, Bali, Ogan dan Lampung. Menyusul peresmian desa-desa ini, pembangunan berbagai sarana dan prasarana terus

⁶ Data Statistik Kecamatan Way Jepara 1980. h.12

dilaksanakan, seperti jalan desa, sekolah dan tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja dan pura.

Banjir besar yang melanda Lampung pada tahun 1979 dijadikan sebagai alasan untuk meninjau ulang keputusan pemerintah daerah (propinsi Lampung), pesatnya pendangkalan waduk Way Jepara yang dibangun pada tahun 1976 yang mampu mengairi 22 ribu ha sawah, semakin meyakinkan pemerintah tentang perlunya menghutankan kembali hutan lindung register 38 Gunung Balak. Penduduk di kawasan hutan lindung ditawarkan pindah sebagai transmigrasi lokal ke kabupaten Lampung Utara, akan tetapi penduduk mencoba untuk tetap bertahan.

Pada tahun 1980 kawasan hutan zaman Belanda yang sudah dimukimi dan digarap penduduk tersebut ditetapkan ulang sebagai kawasan hutan melalui TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan), maka penduduk yang sudah bermukim dan berusaha tani di dalamnya dinyatakan sebagai perambah dan diharuskan meninggalkan kawasan hutan tersebut. Penduduk akan dipindahkan melalui program transmigrasi lokal, pemerintah setempat mulai memerintahkan warga untuk menghentikan kegiatan penggarapan lahan sebab pemerintah pada Repelita II mulai membangun waduk dan jaringan irigasi Way Jepara untuk mengairi persawahan di sekitarnya, oleh sebab itu kawasan Gunung Balak dijadikan daerah tangkapan curah air (*Catchment area*) dan perlu dibebaskan dari permukiman. Penghijauan kembali harus dilakukan dan para perambah hutan harus dipindahkan suka rela atau terpaksa.

Sejak tahun 1983 secara paksa penduduk dipindahkan dari kecamatan Gunung Balak, sejalan dengan perpindahan itu maka terbit SK. Gubernur No. G/245/B.III/HK/1984 yang isinya tentang penghapusan desa; Bandung Jaya, Way Abar, Ogan Jaya, dan Yabakti, kemudian disusul dengan SK. Gubernur No. G/281/B.III/HK/1986 yang isinya menghapus desa Srikaton, Srimulyo, Srikaloka, Sriwidodo dan Sidodadi, dengan SK ini pula Kecamatan Perwakilan Gunung Balak ikut dihapuskan dari peta Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Lampung pada

tahun 1986 masih ada sekitar 22.248 KK yang mendiami wilayah tersebut dan enggan untuk meninggalkannya.

Karena ada penduduk yang masih enggan meninggalkan kawasan tersebut, maka pada tanggal 19 November 1988 dilakukan operasi yang melibatkan puluhan petugas, rumah-rumah harus dibongkar. Penghuninya dipaksa meninggalkan permukiman, yang masih bertahan diamankan. Begitulah mereka meninggalkan tanaman keras, yang telah mereka rawat dan tinggal mememanennya, bahkan yang membuat mereka frustrasi adalah mereka yang tergusur akan tetapi tanaman mereka yang dapat menghasilkan uang justru terus dibiarkan dan di panen oleh petugas, sementara mereka kemudian menjadi buruh di kebunnya sendiri.

Pasca terusirnya dari kawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak Lampung Timur, kondisi petani semakin mengkhawatirkan. Hal ini akibat dari keterbatasan lahan dan kesempatan kerja di tempat yang baru, sementara kebutuhan hidup semakin meningkat, apalagi tanah itu dianggap sebagai tanah dari hasil perjuangan leluhur yang harus ditinggalkan, usaha mereka untuk memperoleh hak atas tanah mengalami kegagalan, semuanya itu semakin memperkuat keresahan dan kemarahan rakyat. Situasi *deprivasi relatif* ini juga semakin mendorong para rakyat untuk melakukan suatu gerakan.

Sebenarnya ketegangan di wilayah yang kesuburan tanahnya memasok 60 persen kebutuhan pangan di Lampung sudah mulai nampak sejak tahun 1956, yakni ketika penduduk asli Sukadana di sekitar Way Jepara Lampung Timur mengirim resolusi dan mosi kepada pemerintah pusat, namun pemerintah pusat justru tidak mengakui kepemimpinan adat. Sikap ini merupakan cerminan dukungan pemerintah pusat terhadap program transmigrasi yang saat itu sedang digalakkan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, terutama program Biro Rekonstruksi nasional (BRN) yang didirikan berdasarkan PP. No.12/1951, sebuah proyek untuk menciptakan kesempatan kerja bagi sekitar 22 ribu eks pejuang yang terkena. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Heeren dalam Joan Hardjono⁷, program BRN mempunyai nilai strategis

⁷ Joan Hardjono (Ed). Transmigrasi dari Kolonialisasi sampai Swakarsa, (Jakarta, Gramedia, 1985), hal 32.

dan ekonomis, strategis dalam ikut serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah sedangkan nilai ekonomis ikut serta dalam memelopori pembangunan di daerah.

Ketegangan terjadi lagi pada tahun 1969, ketika pemerintah berusaha untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang hanya tersisa 14 persen dari 20 ribu hektar hutan di kawasan register 38 Gunung Balak yang sudah di rambah menjadi daerah permukiman, padahal sejak tahun 1935 kawasan hutan tersebut sebagai daerah tangkapan air untuk menjaga debit air danau Way Jepara. Pemerintah baru menyadari munculnya kerawanan satu dasawarsa kemudia, yakni ketika hampir seratus ribu penduduk sudah bermukim dengan tenang di 13 desa di Kecamatan Gunung Balak.

Ketegangan yang yang terjadi pada tahun 1989 antara jamaah Warsidi dengan aparat setempat juga tidak terlepas dari ketegangan sebelumnya, mereka terusir dari kawasan Gunung Balak, setelah terusir dari kawasan hutan lindung dan memperoleh tanah seluas 1,5 Ha dari tokoh kaya Jayus, kemudian di atas tanah tersebut didirikan sebuah mushola berukuran 6 X 9 meter yang diberi nama musola “Mujahidin”. Rasa jengkel dan kecewa atas sikap pemerintah, sebagaimana tercermin dalam perilaku aparat keamanan telah mendorong masyarakat (yang terusir dari hutan lindung) menyatukan sikap dan tindakan. Gerakan masyarakat yang kecewa karena kehilangan akses lahan ini kemudian ditampung oleh Warsidi. Untuk merekatkan solidaritas dan kohesivitas sosial diantara mereka, Warsidi menjadikan ajaran agama (Islam) sebagai tali pengikat yang dapat membangkitkan semangat. Mereka menggunakan jargon agama, seperti jihad dan amar ma’ruf nahi munkar sebagai spirit perjuangan.

Sebenarnya, awal perlawanan yang mereka lakukan yakni dengan mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, tetap melakukan perkumpulan meski dilarang oleh aparat keamanan, dan tidak melapor kepada aparat setiap melakukan kegiatan, tidak mau membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Contoh yang paling nyata adalah pada tanggal 20 Januari 1989 ketika ada panggilan dari Camat Way Jepara yang mengundang Warsidi untuk meminta penjelasan tentang kegiatan yang selama

ini dilakukan dengan tegas ia menolak dengan jawaban yang tegas ”*Sebaik-baik umaro adalah yang dekat dengan ulama dan sejelek-jeleknya ulama adalah yang dekat dengan umaro*

2. Radikalisasi Islam dan Perlawanan Petani.

Tindakan radikal tidak muncul dari ruang hampa. Mengikuti faham kaum fakta social, bahwa radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain. Radikalisme Islam di Indonesia termasuk didalamnya radikalisme petani adalah proses sejarah yang lahir akibat adanya tekanan dari rezim kekuasaan terhadap para aktivis Islam itu sendiri. Menurut Mujani⁸, kelahiran “Islam radikal” dapat dilacak pada munculnya Darul Islam di beberapa kota dan partai politik Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang kerap membangun jaringan transnasional dengan beberapa gerakan di Timur Tengah.

Darul Islam membangun fragmen kelompoknya dengan kekuatan militer. Beberapa perlawanan lahir di Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar), Kalimantan Selatan (Ibnu Hajar), Jawa Barat (Kartosuwiryo), dan Aceh (Daud Beureueh). Dengan kekuatan ini, Darul Islam melancarkan perlawanan kepada pemerintah RI secara terbuka, kendati kemudian dapat diberangus oleh rezim politik ketika itu. Adapun Masyumi membawa gagasan Islam dalam kerangka kenegaraan di parlemen dan berhasil menempati posisi kedua di Pemilu 1955.

Kita dapat menggunakan perspektif historis untuk membaca radikalisasi Islam di Indonesia, menurut Hadiz⁹ kemunculan Islam sebagai sebuah kekuatan politik di Indonesia sarat dengan kepentingan-kepentingan material. Awal mula munculnya Islam sebagai kekuatan politik adalah transformasi dari kekuatan ekonomi umat yang ditujukan untuk melawan hegemoni kekuatan ekonomi Cina dan kolonial di pasar lokal. Konteks kemunculan Sarekat Islam bermula dari H. Samanhudi, yang mempersatukan kepentingan ekonomi umat Islam ke dalam satu wadah, yang

⁸ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta, Gramedia, 2007). Hal 102.

⁹ Hadiz Vedi R. *Politik Pembebasan Teori-teori negara Pasca Kolonial*, (Yogyakarta, Insist Press 1999), h. 72.

akhirnya bertransformasi menjadi partai politik. Awal kemunculan Sarekat Islam tersebut diawali oleh inisiatif pedagang-pedagang muslim untuk melindungi kepentingan dagang mereka dari ekspansi pedagang Cina.

Perkembangan berikutnya, menurut Ricklefs¹⁰ Sarekat Islam pasca-Tjokroaminoto terfragmentasi menjadi SI-Merah yang akhirnya kita kenal sebagai Partai Komunis Indonesia. Sejarah kemunculan Partai Komunis Indonesia, tidak terlepas dari adanya faksionalisasi di kubu Sarekat Islam, yakni faksi Semaun, Alimin dan Tan Malaka. Kubu ini lahir dari Sarekat Islam Semarang yang nota bene berada di kawasan yang penuh dengan petani miskin yang dilindas oleh borjuis lokal. Sehingga, muncul SI Merah yang bersinergi dengan paham sosialisme melahirkan sebuah kekuatan politik baru.

Dalam konteks Negara pasca-Kolonial, kekuatan politik umat Islam yang direpresentasikan oleh Masyumi, juga diwarnai oleh kepentingan-kepentingan material yang menjadi sebuah basis dalam persetujuan kelompok Islam dengan kelompok sekuler dalam perdebatan mengenai ideologi negara. Pada waktu itu, konfik dapat kita gambarkan dalam dua kutub besar: pemilik modal kekuasaan serta mereka yang memiliki basis mengakar (radikal). Ini yang melahirkan aksi-aksi radikal di kemudian hari ketika ada kooptasi oleh mereka yang memiliki modal. Berpijak pada logika tersebut, maka sejarah umat Islam di Indonesia adalah sejarah pergolakan kepentingan-kepentingan materia vis-a-vis mereka yang termarjinalkan.

Orde baru sebagai sebuah rezim kekuasaan justeru mempraktekkan tekanan-tekanan terhadap kekuatan lain yang mencoba untuk melakukan resisten, terhadap Partai Komunis, aktivis Islam dan aktivis prodemokrasi. Aktornya bukan militer atau kekuatan bersenjata yang revolusioner. Orde Baru menggunakan tentara sebagai alat politik, atau dalam bahasa Huntington sebagai “penjaga praetorian”, dan meneguhkan eksistensi rezim yang dibangun dari kapitalisme yang rapuh tersebut selama 32

¹⁰ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, penerjemah Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta, Gadjah Mana University Press, 1991), h, 85.

tahun. Feith ¹¹ menyebut hal ini sebagai rezim “developmentalis represif”.

Persoalan yang terjadi ketika rezim Orde Baru kemudian mengambil alih peran sebagai pemilik sumber daya dan secara represif melakukan subordinasi kepada kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi oposisi terhadap sentralisme peran negara adalah bermunculan gerakan yang bersifat radikal. Orde Baru, dengan perangkat-perangkat birokrasi, baik melalui militer maupun sipil, mentransformasikan diri menjadi rezim otoritarian dengan cara menindas kekuatan-kekuatan yang berpotensi menjadi oposisi termasuk kekuatan Islam¹². Komunisme dijadikan ideologi terlarang dan berusaha diberantas sampai keakar-akarnya tanpa sisa sedikitpun. Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai kekuatan terkuat pasca 1955 dipersempit ruang geraknya dengan membungkam hak politik tokoh-tokohnya. Sementara itu, Islam menjadi kekuatan yang tersisa dan tidak dapat dihabisi oleh rezim karena memiliki basis kultural yang sangat kuat. Untuk melakukan subordinasi terhadap kekuatan Islam, lahirlah diskursus mengenai “Islam Radikal”. Kasus pertama yang dicuatkan oleh rezim Orde Baru adalah Komando Jihad (pembajakan pesawat Woyla) yang disinyalir sebagai aksi terorisme pertama di Indonesia. Kemudian, lahirlah kasus-kasus lain yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik Orde Baru.

Kasus Talangsari yang terjadi pada tahun 1989 adalah bentuk kongkrit upaya rezim Orde Baru untuk melakukan subordinasi terhadap kekuatan Islam. Di sisi lain, borjuasi yang pada hakikatnya dibangun atas hubungan patrimonial antara negara dan pasar juga melahirkan disparitas dan kekecewaan di akar rumput. Sehingga, basis sosial dari kelompok yang disebut oleh Orde Baru sebagai “Islam Radikal” ini pun lahir dan terkonstruksi oleh realitas politik. Pada titik ini, Vedi R. Hadiz¹³ memberikan sebuah tesis: “Islam Radikal” pada hakikatnya dilahirkan oleh Orde Baru.

¹¹ Feith Herbert, *Pemikiran Politik Indonesia* (Jakarta, LP3ES, 1988), h.72.

¹² David Jenkins, Soeharto dan Barisan Jendral ORBA Rezim Militer 1975-1983, (Jakarta, Komunitas bambu, 2010), h.153.

¹³ Hadiz Vedi R. *Op.cit* h.87.

Kelahiran radikalisme Islam merupakan sebuah proses panjang dari turbulensi sosial dan politik yang mencuat karena rezim Orde Baru yang begitu represif telah menggunakan peran-perannya untuk menekan Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia.

Hal ini dilakukan karena sejak awal pemerintah Orde Baru yang didukung oleh Angkatan Darat telah menyadari adanya kemungkinan naiknya pamor politik Islam. Pemerintah Orde Baru melihat bahwa umat Islam merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik yang sedang dijalankan dalam memodernisasikan Indonesia. Runtuhnya faham komunis melalui tragedi berdarah pada september 1965, yang kemudian secara formal diperkuat dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah tentang pembubaran dan pelarangan faham komunis, sehingga dengan demikian dalam peta politik Indonesia saat itu terjadilah ketidakseimbangan.

Untuk mengantisipasi setiap kekuatan arus politik Islam ini, pemerintah Orde Baru menjalan berbagai pola dan aksi melalui intelejennya terhadap umat Islam di semua segmen kehidupan. Politik rekayasa¹⁴ dijalankan, sasaran pertama yang menjadi target dengan jalan rekayasa politik adalah Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), karena dalam Parmusi masih banyak bercokol para politikus Islam yang mempunyai militansi Islam sehingga berpotensi untuk membangkitkan kembali misi Islam dalam ajang pemilu dengan menjadikan umat Islam sebagai basis pendukungnya.

Politik rekayasa lain berusaha membangun terjadinya konflik di masyarakat, baik konflik kelas maupun konflik politik aliran, sehingga masyarakat senantiasa berada dalam situasi konflik. Hal ini sejalan dengan perspektif sosiologi marxis yang memandang masyarakat tidak bersifat statis, karena selalu berada dalam kondisi yang konfliktual, yakni pertentangan kelas proletar lawan borjuis. Sejarah masyarakat, demikian menurut Marx, adalah sejarah perjuangan kelas¹⁵. Pandangan ini didasari oleh keyakinan

¹⁴ Tabrani Syabirin, *Menjinakkan Islam—Strategi Politik Orde Baru*, (Jakarta, TERAS, 2014), h.15-16.

¹⁵ Franz Magis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001).

bahwa struktur sosial sebuah masyarakat, secara deterministik dibentuk oleh sistem ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Terciptanya struktur sosial dalam sebuah masyarakat, bukan karena individu-individu yang ada didalamnya saling bergantung dan berfungsi satu sama lain, melainkan karena adanya kelas yang didominasi (kaum proletar) dan kelas yang mendominasi (kaum borjuis). Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat tidak pernah statis, karena kaum proletar sebagai pihak yang didominasi akan senantiasa melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis. Asumsinya, hanya dengan jalan mengubah sistem ekonomilah, struktur masyarakat yang dominatif akan berubah. Karena itu, meskipun Marx meyakini adanya telos (tujuan akhir) dalam perjalanan sejarah masyarakat – yang itu berarti akhir dari konflik dan pertentangan kelas – tetapi dia percaya, hanya dengan jalan perjuangan kelas dan revolusilah telos dari perjalanan sejarah masyarakat bisa tercapai.

Di lihat dari perspektif Marxis, maka perlawanan petani tidak dianggap sebagai penyakit sosial, melainkan merupakan gejala yang positif. Kemunculannya bukan disebabkan oleh adanya gangguan dalam struktur sosial, melainkan karena terjadinya proses eksploitasi dan dominasi satu kelas terhadap kelas lainnya. Perlawanan petani dipahami sebagai reaksi kaum proletar terhadap kaum borjuis, merupakan ekspresi dari struktur kelas yang kontradiktif. Singkatnya, perlawanan petani adalah perjuangan kelas yang lahir karena adanya kesadaran kelas. Meminjam pemikiran Scott¹⁶, sesuai dengan kondisi sosial-culturanya petani yang umumnya hidup dalam situasi sosial-ekonomi subsisten memiliki caranya sendiri dalam bereaksi. Perlawanan petani di Talangsari timbul dalam kondisi dan struktur sosial tertekan serta hubungan-hubungan yang eksploitatif dan refresif. Perlawanan petani terhadap eksplotasi dan penindasan oleh kekuasaan atau kekuatan-keuatan struktural yang mencengkrum mereka sepanjang sejarahnya memperlihatkan gejala endemik dan sporadis.

Dalam beberapa kasus fanatisme agama memainkan

H.113-114.

¹⁶ James Scott, *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 63.

peran penting dalam perlawanan petani. Perlawanan-perlawanan kaum tani mempunyai ciri-ciri ideologis yang ditemukan dalam semua gerakan, di mana perlawanan itu umumnya dinyatakan sebagai gerakan juru selamat (*mesianisme*), gerakan ratu adil (*milenarisme*), gerakan kepribumian (*nativisme*), dan gagasan-gagasan perang suci¹⁷. Perlawanan petani di Talangsari pada tahun 1989 juga menjadikan fanatisme agama sebagai ideologi gerakan untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan di bawah panji-panji Islam.

3. Signifikansi dan Problematika Perlawanan Petani

Kegagalan perlawanan petani di Talangsari Lampung Timur melalui aksi *reclaiming* terhadap lahan di kawasan hutan register 38 Gunung Balak dan melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan setempat dalam banyak hal selain adanya stigma buruk sebagai gerakan pengacau keamanan, juga membawa sejumlah persoalan-persoalan sosial baru, seperti munculnya diskriminasi dalam pembangunan, sehingga hak-hak sebagai warga negara terabaikan, sebutan sebagai Islam PKI muncul kepermukaan. Endapan pengalaman traumatis politik masa lalu sebagai beban sejarah telah menambah persoalan kehidupan sosial masyarakat rakyat sehingga para rakyat kembali bernasib sial menumpuk dan tidak prospektif.

Hasil studi ini dengan demikian juga menunjukkan semakin terpuruknya rakyat ke dalam lobang yang sama. Perlawanan yang dilakukan dengan cara menduduki kembali terhadap lahan dan permukiman yang selama ini ditempati serta pembangkangan terhadap otoritas pemerintah ternyata tidak cukup signifikan mengantar rakyat ke posisi tawar yang lebih kuat, baik secara struktural maupun kultural. Keterjebakan rakyat pada situasi seperti itu antara lain tidak terlepas dari sifat perlawanannya yang dilakukan kurang matang, kondisional dan emosional sehingga berakhir kegagalan.

Perlawanan petani di Talangsari yang dipimpin oleh Warsidi merupakan gerakan radikal yang menggunakan simbol Islam.

¹⁷ Sartono kartosudirdjo. Pemberontakan Petani Banten 1888, (Jakarta, Yayasan Ilmu Sosial dan Pustaka Jaya, 1984), h.26.

Perlawanan ini dikatakan radikal karena spirit Islam skripturalistik dan fundamentalistik merupakan sumber inspirasi dan nilai yang digunakan Warsidi dalam membangun komunalisme di kawasan Talangsari. Deprivasi sosial-ekonomi dan represi politik dari negara dan kekuatan ekonomi pasar (kapitalis) Orde Baru merupakan faktor yang menumbuh-kembangkan eksklusifisme perlawanan Warsidi dalam menghadapi semua tekanan dan himpitan itu.

Dalam konteks perlawanan petani seperti itu, maka sesungguhnya perlawanan petani adalah perlawanan kemanusiaan; sebab tanah menjadi sumber sekaligus taruhan hidup petani. Bahkan, tanah tidak hanya sebagai simbol eksistensi diri sebagai petani, melainkan juga simbol harga diri sebagai manusia pedesaan yang hidupnya bersumber dari sektor pertanian. Perampasan tanah, bagi petani dipandang sebagai perampasan hak hidupnya sebagai petani sehingga siapapun yang mengambil tanahnya akan selalu dilawan dengan berbagai cara. Sehubungan dengan itu, ketidakstabilan sosial, keresahan sosial dan perlawanan akan selalu muncul, selama ada tanah yang dimiliki petani, baik berdasarkan historis maupun hukum yang seharusnya menjadi hak petani terampas.

Selama di masyarakat ada rakyat yang berprofesi sebagai petani, maka selama itu pula harus disediakan tanah, seperti Indonesia yang lebih separuh penduduknya sebagai petani, namun sebagian besar dari mereka hanya bertanah sempit (*peasant society*; bukan *farmer*), bahkan tidak bertanah sekali. Selama masih ditemui banyak rakyat hanya bertanah sempit, apalagi tidak mempunyai tanah sama sekali, maka selama itu pula akan selalu ada gerakan perlawanan mulai dari yang laten, terselubung sampai yang radikal.

Perlawanan petani adalah produk dari kebijakan negara yang bertentangan, atau yang dipahami rakyat sebagai telah merampas dan atau mengancam sumber hidup dan kehidupan rakyat. Jika perampasan tanah sebagai sumber dan eksistensi kehidupan rakyat dilakukan dalam konteks pembangunan dan untuk itu (apalagi) melibatkan pihak lain (kalangan swasta misalnya, apalagi dengan cara-cara paksa dan bernuansa KKN), maka tingkat perlawanan rakyat akan sangat keras, militan, emosional

dan destruktif. Apabila memperhatikan pola hubungan sosial, politik dan ekonomi pada era Orde Baru sehingga nasib rakyat tidak akan banyak berubah sebagaimana diharapkan.

Studi ini akhirnya selain bisa ikut menggambarkan benang-kusut masalah agraria pedesaan dan adanya politik rekaya dalam meminggirkan peran Islam politik dalam pentas politik nasional, juga memperlihatkan bahwa penggunaan instrumen politik yang sistematis telah turut menyumbang kepada terjadinya intensitas konflik-konflik agraria dan proses kekerasan yang terjadi di Indonesia.

Hasil studi ini sangat mungkin ditemukan sejumlah keterbatasan, bukan hanya karena studi ini bersifat kasuistik, melainkan juga dalam persoalan teori yang dirujuk dan metodologi yang digunakan. Sebagai studi kasus, secara metodologis kesimpulan studi ini sudah tentu tidak bisa digeneralisasikan untuk menggambar fenomena yang sama pada ruang dan waktu yang berbeda; meski secara substansial sangat mungkin bisa saja hal itu dilakukan.

Sebagai kajian yang bernuansa sosiologi historis, secara metodologis studi ini seharusnya dilakukan dalam rentang waktu yang panjang, *longitudinal* dan peneliti mesti-berada di dalam masyarakat petani dengan waktu yang cukup lama. Dengan pendekatan seperti itu akan sangat membantu peneliti dalam memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesinambungan dan perubahan serangkaian peristiwa sejarah kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk rentetan sejarah penolakan dan perlawanan petani. Meski peneliti telah secara maksimal berupaya memenuhi ketentuan metodologi seperti itu, namun diakui masih belum bisa dilakukan secara maksimal.

Selain faktor sifat studi dan metodologi di atas, terdapat sejumlah kendala lain terutama berkaitan dengan sumber data (informan). Sebagian besar informan, karena begitu bergairah dan semangatnya mendapat pertanyaan tentang perlawanan petani, mereka acapkali justru memberikan jawaban yang berlebihan sehingga membuat peneliti harus berupaya melakukan *check and recheck*. Sedang sebagian yang lain, justru enggan dan

terkesan ketakutan menjawab pertanyaan yang karena posisi mereka yang kurang menguntungkan dan dilematis. Para keluarga korban eks Talangsari, dan orang-orang yang tidak setuju dengan radikalisasi yang dilakukan, mengaku serba salah dan takut dianggap memihak kepada kelompok perlawanan sehingga mereka lebih senang bersikap diam. Untuk itu, peneliti pun perlu kerja ekstra keras, sabar dan ulet agar bisa meyakinkan mereka sehingga bisa dan bersedia memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1989 itu.

Kendala lain adalah kesibukan rakyat karena mengerjakan lahan sepanjang hari di ladang sebagai petani dan adanya trauma tentang tragedi dan stigma pemberontak yang dilabelkan kepada mereka, membuat mereka merasa curiga dan enggan memberikan keterangan secara jujur. Sedangkan untuk menemui para aktor yang terlibat langsung dalam perlawanan petani, baik aktor lokal maupun aktor supra lokal perlu waktu yang cukup lama. Sudah barang tentu peneliti berupaya 'mengatasi' sejumlah kendala di atas dengan beberapa cara. Misalnya, peneliti berusaha mengenali dan memahami sebaik mungkin peta sosial dan demografis lokasi penelitian.

Memperhatikan strategi metodologi yang dikembangkan peneliti di atas, barangkali dan sangat mungkin perlu dikritisi secara metodologis. Namun, peneliti sependapat dengan Koentjaraningrat¹⁸, bahwa metode penelitian sosial bukanlah serangkaian peraturan yang seragam, kaku dan berlaku secara umum di mana saja bisa dipergunakan secara mentah-mentah dan apalagi kemudian hal ini menjadi tolok ukur keberhasilan penelitian sosial. Keberhasilan penelitian sosial justru banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti mengawinkan antara sifat manusawi dan ilmiah, yakni daya cipta, kreatifitas dan rasanya yang peka terhadap lingkungan hendaknya dipertajam dengan ketelitian serta ketepatan yang mantap.

Berdasar pada sejumlah kendala seperti itu, perlu disadari bahwa temuan-temuan hasil studi ini harus dipahami

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 7

dan diposisikan pada konteks keterbatasan metodologis dan keterbatasan teoritik di atas. Kesimpulan studi ini, sekali lagi, sesungguhnya merupakan ekspresi petani miskin di pedesaan yang selama puluhan tahun termarginalisasi baik secara struktural dan kultural oleh bekerjanya sistem birokrasi pemerintahan yang represif, bias keadilan sosial dan abai terhadap kepentingan rakyat kecil.

Ketika kekuasaan begitu kuat, represif dan hegemonik menyebabkan rakyat tertindas tidak mempunyai ruang, kesempatan dan keberanian melakukan perlawanan secara terbuka, kecuali melalui ekspresi-ekspresi kejengkelan dan aksi-aksi penolakan secara terselubung. Tetapi, ekspresi dan aksi-aksi dibalik baju yang biasa dipergunakan rakyat miskin, bodoh, lemah dan yang selama ini dicitrakan sebagai komunitas penurut tersebut secara mendadak bisa berubah menjadi kekuatan luar biasa ketika berbagai tekanan sudah sampai pada batas keamanan subsistensi hingga mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup mereka. Ancaman subsistensi itu ibarat bara api dan bom waktu telah meledak secara dahsyat melalui radikalisasi petani seperti di Talangsari.

Dengan demikian, radikalisasi petani merupakan puncak ekspresi kejengkelan, ketidakpuasan dan kemarahan rakyat terhadap kebijakan negara dan tekanan modal yang selama puluhan tahun dinilai telah menjadikan rakyat menjadi miskin dan terpenjara di tanah sendiri. Radikalisasi dalam bentuk perlawanan petani di Talangsari sekaligus memperlihatkan selain lemahnya akses rakyat dalam mempengaruhi dan atau setidaknya mewarnai kebijakan di sektor agraria, juga menunjukkan tidak berfungsinya berbagai institusi pemerintahan dan perwakilan rakyat terutama institusi yang ada di daerah.

Jika demikian persoalannya, maka radikalisasi petani di Talangsari sesungguhnya merupakan fenomena dan potret sosial kaum papa dan lemah di tengah semakin deras arus perubahan sosial akibat kebijakan agraria yang tidak berpihak kepada petani. Dengan demikian, di tengah arus besar pembangunan yang dicanangkan oleh rezim Orde Baru saat itu, sangat mungkin proses marginalisasi yang mengancam subsistensi komunitas (baik

material maupun non material) akan terjadi kepada banyak bagian komunitas-komunitas lain di luar petani.

Kajian terhadap radikalisasi petani terasa kurang lengkap ketika disadari tidak sempat terungkapkannya peran birokrasi pemerintah daerah dan propinsi di bidang kehutanan dan perkebunan serta dinamika kebijakan agraria di Indonesia. Sebab, persoalan tata kerja, keluarnya sertifikat pertanahan misalnya berkaitan secara langsung dengan birokrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah dan propinsi ini yang dalam realitasnya menjadi sumber persoalan utama perlawanan petani di Talangsari. Karena itu, akan sangat menarik dan bisa melengkapi serta menyempurnakan hasil studi ini, apabila dilakukan studi lanjutan berkaitan dengan permasalahan yang belum sempat diperhatikan dalam studi ini tersebut.

Meski dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, hasil studi ini setidaknya bisa menambah perbendaharaan kajian-kajian tentang dunia petani dengan segala dinamikanya yang sejak satu atau dua dasawarsa terakhir kurang diminati peneliti dan kalangan akademisi. Terdapat satu catatan yang menurut peneliti penting diperhatikan adalah bahwa dunia petani dan sektor pertanian adalah tumpuan dan taruhan hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Adalah sangat ironis manakala bangsa Indonesia yang acap disebut sebagai negara agraris namun kebijakan negaranya justru kontra-keagrariaan dan pro-kapitalis sehingga petaninya termarginalisasi dan terdegradasi secara sosial dan ekonomi. Selama sebagian besar rakyat menyatakan diri sebagai petani, namun pada saat yang sama mereka tidak mempunyai tanah, dan apalagi tanahnya semakin banyak yang terambil alih pihak lain, maka selama itu pula akan selalu terjadi gerakan perlawanan yang boleh jadi semakin keras, militan dan destruktif. Itulah sebabnya mengapa radikalisasi, resistensi, perlawanan dari petani sesungguhnya adalah produk (*resultante*) dari kebijakan negara.

C. Penutup

Dengan berpijak pada analisis di atas, makalah ini berkesimpulan bahwa adanya radikalisme pada masyarakat petani

muslim di pandang dari unit analisis historis dan ekonomi-politik, berakar dari adanya kesenjangan-kesenjangan di masyarakat Indonesia. Secara historis, engkesenjangan tersebut terjadi karena adanya kelompok yang mengakumulasi modal dan kekuasaan. Dengan kata lain, akar dari masalah radikalisme petani muslim bukan persoalan teologis. Kemiskinan adalah sebuah implikasi dari tiruan kebijakan yang tidak disesuaikan dengan konteks dan kondisi objektif dari negara tersebut, oleh sebab itu persoalan munculnya radikalisme tidak terlepas bagaimana negara mengentaskan kemiskinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ba'asyin Anis Sholeh, *Samin: mistisisme petani di tengah pergolakan*, Semarang, Gigih Pustaka Mandiri, 2014.
- Gurr Ted Robert, *Why Men Rebel*, New Jersey, Princeton University Press, 1970.
- Data Dinas Kehutanan Propinsi Lampung 1995
- Data Statistik Kecamatan Way Jepara 1980.
- Depdikbud. *Sejarah Daerah Lampung*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977/1978.
- Hardjono Joan (Ed). *Transmigrasi dari Kolonialisasi sampai Swakarsa*, Jakarta, Gramedia, 1985.
- Herbert Feith, *Pemikiran Politik Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1988.
- Jackson Karl D., *Kewibawaan Tradisional Islam dan pemberontakan: Kasus darul Islam Jawa Barat*, Jakarta, Grafiti Press, 1990.
- Jenkins David, Soeharto dan Barisan Jendral ORBA Rezim Militer 1975-1983, (Jakarta, Komunitas bambu, 2010).
- Kartosudirdjo Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta, Yayasan Ilmu Sosial dan Pustaka Jaya, 1984.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani*, Yogyakarta, Benteng Intervisi Utama, 1994.
- Kusworo Ahmad, *Perambah Hutan atau Kambing Hitam ? Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung*, Bogor , Pustaka Latin, 2000.
- Magis Suseno Franz, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.

M. Mawardi J

- Mujani Saiful, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta, Gramedia, 2007.
- Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, penerjemah Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta, Gadjah Mana University Press, 1991.
- Scott James, *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Suhendar Endang dan Budi Winarni Yohana, *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung, Yayasan AKATIGA, 1997.
- Syabirin Tabrani, *Menjinakkan Islam—Strategi Politik Orde Baru*, Jakarta, TERAS, 2014.
- Vedi R Hadiz. *Politik Pembebasan Teori-teori negara Pasca Kolonial*, Yogyakarta, Insist Press 1999.
- Wolf Eric R. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985.